

ABSTRACT

The governance of shared tourism resources has previously been criticized for neglecting the rights of indigenous peoples and local knowledge in maintaining and developing the tourism economy and environment. The resource governance policy process is structured using mono factor analysis, institutional functions do not work. This is not in accordance with the sustainable tourism development platform. The impact is that conflicts arise over the use of resources, resulting in failure to improve welfare, justice for local indigenous communities and weaken the sustainability of tourism development. Therefore, changes in interactive governance are needed to support the success of tourism development. Institutional analysis development (IAD) is an interactive governance framework chosen to obtain key success factors for the management of tourism resources. The main focus is the policy-making process that prioritizes indigenous peoples and the working of institutional functions. The effectiveness can be seen from the analytical framework using multi factors, very easily adapted to different contexts, integrating contextual factors that occur in the field, so that policies are the result of institutional relations between various knowledge, expertise and policy making through new coalitions with indigenous communities. Efforts to position indigenous peoples who are politically weak in policy making will be able to overcome conflicts over tourism resources, as well as foster social capital of indigenous peoples' trust. The research formulates the problem of key/contextual factors that support the successful development of interactive tourism resource management within the IAD framework. The specific objectives of the research are: to develop an IAD-based interactive tourism resource governance model to support indigenous peoples-friendly tourism development. PRA is used as a method to explore new findings using need assessment and prospective analysis. The research results contribute to national development priorities, namely tourism development.

KEY WORDS : *Governance, tourism resources, institutional and adaptive, indigenous peoples, tourism development*

ABSTRAK

Tatakelola sumberdaya pariwisata bersama sebelumnya dikritik dikarenakan pengabaian hak-hak masyarakat adat dan pengetahuan local dalam memelihara dan mengembangkan ekonomi dan lingkungan pariwisata. Proses kebijakan tatakelola sumberdaya disusun menggunakan analisis mono factor, fungsi-fungsi institusi tidak bekerja. Hal ini tidak sesuai *platform* pengembangan pariwisata berkelanjutan. **Dampak**, muncul konflik pemanfaatan sumberdaya, mengakibatkan gagal meningkatkan kesejahteraan, keadilan bagi komunitas local adat dan melemahkan keberlanjutan pengembangan pariwisata. Oleh karenanya diperlukan perubahan tata kelola interaktif untuk mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata. **Institutional analysis development (IAD)** merupakan kerangka tatakelola interaktif yang dipilih untuk mendapatkan factor kunci keberhasilan tatakelola sumber daya pariwisata. Fokus utamanya adalah proses pembuatan kebijakan mengedepankan masyarakat adat dan bekerjanya fungsi-fungsi institusional. Keefektifan terlihat dari kerangka analisis menggunakan multi factor, sangat mudah disesuaikan dengan berbagai konteks yang berbeda, mengintegrasikan factor-faktor kontekstual yang terjadi di lapangan, sehingga kebijakan merupakan hasil hubungan institusional antara berbagai *pengetahuan, keahlian dan pembuatan kebijakan* melalui koalisi baru bersama komunitas adat. Upaya untuk mendudukan masyarakat adat yang lemah secara politik dalam pembuatan kebijakan akan dapat mengatasi konflik sumberdaya pariwisata, sekaligus menumbuhkan modal sosial- *trust* masyarakat adat. **Penelitian merumuskan permasalahan** faktor-faktor kunci/konstekstual yang mendukung keberhasilan pengembangan tatakelola sumberdaya pariwisata interaktif dalam kerangka IAD. **Tujuan khusus penelitian** adalah: mengembangkan model tata kelola sumberdaya pariwisata interaktif berbasis IAD untuk mendukung pengembangan pariwisata yang ramah masyarakat adat. **PRA** digunakan sebagai metode untuk mengeksplorasi temuan baru menggunakan analisis *need assessment* dan *prospektif*. Hasil penelitian berkontribusi **prioritas pembangunan nasional** yaitu pengembangan pariwisata.

KATA KUNCI : Governance/tatakelola, sumberdaya pariwisata, institusional dan adaptif, masyarakat adat, pengembangan pariwisata